



LAMPIRAN II.A  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 42 /PMK.07/2009 TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN  
UMUM PENGGUNAAN DANA  
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL  
DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TAHUN 2009

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SURAT PERNYATAAN

Nomor: .....

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/ Kabupaten/Kota\*) ..... menyatakan telah mencantumkan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009 dalam APBD Tahun 2009 atau akan mencantumkannya dalam APBD Perubahan Tahun 2009 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Gubernur/Bupati/Walikota  
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ....

(cap dan tanda tangan)  
(materai Rp6000,-)  
Nama .....

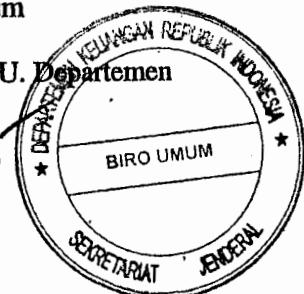
\*) Coret yang tidak perlu

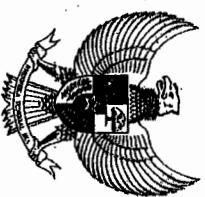
MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIB  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 42 /PMK/07/2009 TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN  
UMUM PENGGUNAAN DANA  
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL  
DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TAHUN 2009

## Jadwal (Time Schedule) Rencana Penyelesaian Kegiatan

Provinsi/Kabupaten/Kota<sup>1)</sup> .....

No	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1.	Pembuatan Surat Pernyataan	2)									
2.	Pencairan Tahap I										
3.	Pelaksanaan Kegiatan Tahap I										
4.	Pelaporan Penyelesaian Tahap I										
5.	Pencairan Tahap II										
6.	Pelaksanaan Kegiatan Tahap II										
7.	Pelaporan Penyelesaian Tahap II										
8.	Pencairan Tahap III										
9.	Pelaksanaan Kegiatan Tahap III										
10.	Pelaporan Final Kegiatan										

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Gubernur/Bupati/Walikota .....  
Pemerintah Prov/Kab.Kota .....

(cap dan tanda tangan)

(materai Rp6000,-)

Nama

Salinan sesuai dengan

Kepala Biro Umum

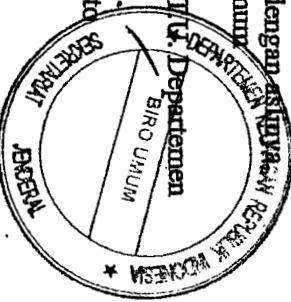
U.b.

Kepala Bagian TU, Departemen

Biro Umum

.....

Antonius Subarto  
NIP 0600414107



MENTERI KEUANGAN  
td.  
SRI MULYANTI NDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 42 /PMK.07/2009 TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN  
UMUM PENGGUNAAN DANA  
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL  
DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TAHUN 2009

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DPDF dan PPD  
TAHUN ANGGARAN 2009**

Provinsi/ Kabupaten/ Kota <sup>1)</sup> :  
Perda APBD Nomor ..... Tanggal .....

<b>Bidang <sup>2)</sup></b>	<b>Pagu <sup>2)</sup></b>
1. ....	.....
2. dst.....	.....
<b>Total Pagu</b>	.....

Tanggal <sup>3)</sup>	Tahap	Sisa Tahap sebelumnya	Penerimaan dari Kas Umum Negara	Total	Realisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) <sup>4)</sup>	Sisa DPDF dan PPD di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = (7/5) x 100%
	Tahap I						
	Tahap II						
	Tahap III						
<b>Total</b>							

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Gubernur/ Bupati/ Walikota

(cap dan tanda tangan)  
(materai 6000,-)

Nama .....

Keterangan.:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Dilisik sesuai dengan alokasi dalam PMK Nomor ..... Tentang
- 3) Dilisik tanggal diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- 4) Minimal 90% dari dana yang ada di Rekening Kas Umum Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.I. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI